

**LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTIK
PENERAPAN PERATURAN PBB P2 DI WALIKOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026**

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan
Jenjang Pendidikan Strata Satu



Disusun Oleh :

Cut Cellisca Anastasia Putri Donnie NIM : 2332500053
Stevano Hermawan NIM : 2332500202

Nomor Laporan : 260192

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

LEMBAR PENGESAHAN



Nama : Cut Cellisca Anastasia Putri Donnie
Nomor Induk Mahasiswa : 2332500053
Nama : Stevano Hermawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2332500202
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Studi : Strata 1
Judul : PENERAPAN PERATURAN PBB P2 DI WALIKOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

Laporan Kuliah Kerja Praktek ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Tim Penguji:

Penguji : Triana Anggraini, S.E., M.Akt.
Pembimbing : Triana Anggraini, S.E., M.Akt.
Ketua Program Studi : Prita Andini, S.E., M.Akt.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.2.1 Maksud Kuliah Kerja Praktik	2
1.2.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktik.....	3
1.3. Metode Pengumpulan Data	3
1.4. Sistematik Penulisan Laporan	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1. Sejarah Tempat dan Logo Tempat Kuliah Kerja Praktik (KKP)	5
2.1.1 Sejarah Tempat Kuliah Kerja Praktik (KKP)	5
2.1.2 Logo Tempat Kuliah Kerja Praktik (KKP).....	6
2.2. Visi dan Misi	7
2.3. Struktur Organisasi.....	8
2.3.1. Tugas dan Fungsi	8
BAB III LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA PRAKTIK (KKP)	10
3.1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Peraturan yang Melandasi PBB-P2	10
3.1.1. Pengertian PBB-P2	10
3.1.2. Objek dan Subjek PBB-P2.....	10
3.1.3. Peraturan yang melandasi PBB-P2.....	11
3.1.4. Pentingnya Peran PBB-P2 Bagi Daerah	12
3.2. Manajemen Risiko dalam PBB-P2.....	12
3.2.1. Manajemen Risiko	12
3.2.2. Peran Manajemen Resiko dalam PBB-P2	13
3.3. Teknis Pengendalian Realisasi PBB-P2 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta 15	
3.3.1 Pemutakhiran Data PBB-P2.....	15

3.3.2. Pemberitahuan Total Pajak Kepada Wajib Pajak	16
3.3.3. Validasi Total Pajak Yang Harus Dibayar.....	17
3.3.4. Monitoring Realisasi Pembayaran	17
3.3.5. Rekonsiliasi Data Pembayaran	18
3.3.6. Pengawasan Piutang PBB-P2	18
3.3.7. Penagihan Aktif	19
3.3.8. Pelaporan dan Evaluasi Berkala	20
BAB IV PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Saran	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan.....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Bagian Keuangan	8
Gambar 3 Flowchart Teknis Realisasi PBB-P2 di DKI Jakarta.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Permohonan Magang	25
LAMPIRAN 2 Surat Balasan Magang.....	26
LAMPIRAN 3 Dokumentasi Kegiatan	27
LAMPIRAN 4 Lembar Konsultasi Pembimbing Lapangan	28
LAMPIRAN 5 Form Penilaian KKP Cut Cellisca Anastasia P.D	29
LAMPIRAN 6 Form Penilaian KKP Stevano Hermawan.....	30
LAMPIRAN 7 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing.....	31
LAMPIRAN 8 Keterangan Selesai Magang Cut Cellisca Anastasia P.D.....	32
LAMPIRAN 9 Keterangan Selesai Magang Stevano Hermawan	33
LAMPIRAN 10 Sertifikat Magang.....	34

DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda DKI Jakarta. (2026, 10 Juli). Penjelasan tentang pembebasan sanksi PBB 2013, 2014, 2015. <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/penjelasan-tentang-pembebasan-sanksi-pbb-201520142013>
- Bapenda DKI Jakarta. (2026, 10 Juli). Upaya penagihan tunggakan PBB-P2. <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/upaya-penagihan-tunggakan-pbbp2>
- Bapenda DKI Jakarta. (2026, 10 Juli). Upaya mengatasi tunggakan PBB. <https://dpp.jakarta.go.id/berita/upaya-mengatasi-tunggakan-pbb>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/b6dbbe5d-a390-413b-b82d-b6f5b1a04b80/2024pmkeuangan085.pdf>
- Pajakku. (2026,10 Juli). Warga Jakarta kini bisa koreksi data PBB-P2 secara online, begini caranya. <https://pajakku.com/artikel/warga-jakarta-kini-bisa-koreksi-data-pbb-p2-secara-online-begini-caranya>
- Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2011). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2011PERDA003116.pdf>
- Peraturan Daerah Ibukota Jakarta. (2016). Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Dikelola oleh Pemerintah Daerah. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/11025>
- Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2020). Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2020PERGUB0031122.pdf>
- Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2025). Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14456/keputusan-gubernur-nomor-281-tahun-2025-tentang-kebijakan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-tahun-2025>

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2026). Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14809>

Pemerintahan Republik Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/uu%2012%201994.pdf>

Pemerintahan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022.pdf>

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>